

Kos Crisis Center Sebuah Model Manajemen Kesejahteraan Sosial Pelajar dan Mahasiswa di Yogyakarta

Sugiyanto

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Jalan Timoho 317 Yogyakarta, 55225 Telp. 0274 561971

Abstract

Based on the history of Yogyakarta Province as a special region, it has created a romance for the region as education city. One of the positive impact of education, it resulted many sosial profit organizations and non-profit organizations which become an energy for Yogyakarta in packing the privilege. Kos Crisis Center (KCC) is a non-profit sosial organization which born on the initiative of PKK team movement (Tim Pengerak PKK) of Yogyakarta in 2002 from the embryos of PKK program named "Greeting boarding students " of KCC as bridge between the students with the local community of Yogyakarta and the local government. KCC is like a hodgepodge of spices that create prosperity for many parties (students, community, government and business actors) through life in a special area with the frame of multicultural and multi-religious and multi level. KCC thus has a contribution to maintain the city reputation as a city of education, city cultural, city tourism and miniature of tolerance city in Indonesia.

Keywords : *kos crisis center, welfare-student and colleagues*

Abstrak

Berbasis sejarah kelahiran kota Yogyakarta sebagai daerah istimewa memiliki romantika dalam menciptakan Yogyakarta sebagai kota pendidikan, Salah satu dampak positif Yogyakarta sebagai kota pendidikan lahir berbagai organisasi sosial profit dan non profit yang menjadi energi bagi Yogyakarta dalam mengemas keistimewaan. Kos crisis center (KCC) merupakan organisasi sosial non profit lahir atas prakarsa Tim Pengerak PKK Kota Yogyakarta pada tahun 2002 berawal dari embrio program PKK "sapa anak kos" KCC sebagai jembatan pelajar dan mahasiswa dengan masyarakat lokal Yogyakarta serta dengan pemerintah daerah setempat. KCC bagaikan bumbu gado-gado yang mampu menciptakan kesejahteraan banyak pihak (pelajar, mahasiswa, masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha) dalam mengarungi hidup di daerah istimewa dengan bingkai multikultur dan multi level serta multi religi. Sehingga KCC berkontribusi mempertahankan reputasi Kota Yogyakarta sebagai Kota pendidikan, kota budaya, kota pariwisata dan kota toleransi dalam miniature Indonesia.

Kata-Kata Kunci: kos krisis center, kesejahteraan sosial pelajar dan mahasiswa

Pendahuluan

Bertolak dari pendekatan sejarah dan politik Yogyakarta memiliki nilai pembentuk pusat pendidikan, sehingga masyarakat memberi *trust* dan kerelaan bahwa Yogyakarta sejak berdirinya kerajaan Mataram menjadi pusat belajar masyarakat. Menurut Bambang Soewondo (1977:140) pendidikan di Yogyakarta dimulai sejak abad 18 dan diselenggarakan di sekitar kerajaan/kraton, proses pendidikan terselenggara atas ijin dan bantuan pihak kerajaan. Salah satu aspek positif dari masa pendidikan Belanda dan Jepang mereka banyak merintis sekolah yang awalnya untuk kepentingan negeri penjajah tetapi sebagian warga Indonesia khususnya masyarakat Yogyakarta juga mendapat kesempatan mengikuti pendidikan tersebut. Setelah Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, sekolah-sekolah peninggalan Belanda dan Jepang diteruskan oleh pemerintah dan masyarakat. Menjelang Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 di Jakarta didirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) pada tanggal 27 Rajab 1364H atau bertepatan tanggal 8 Juli 1945, yang didirikan oleh tokoh nasional Dr. Moh. Hatta, Moh. Natsir, Prof. KHA. Moh. Roem, KH. Wahid Hasyim, dan kawan-kawan. Perguruan Tinggi (PT) ini merupakan wujud cita-cita tokoh nasional Indonesia yang melihat kenyataan bahwa PT pada waktu itu semuanya milik Belanda. Karena situasi politik STI dari Jakarta hijrah ke Yogyakarta. Dan STI diresmikan kembali oleh Presiden Soekarno tanggal 27 Rajab

1365H atau bertepatan tanggal 10 April 1946 di nDalem Pangulon Yogyakarta dan diubah namanya menjadi Universitas Islam Indonesia (UII). Situasi pendidikan di Yogyakarta pasca kemerdekaan RI 1945 melanjutkan sekolah-sekolah atas bentukan penjajah Belanda dan Jepang, sehingga sekolah-sekolah tersebut dikelola baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah RI pada tanggal 3 Maret 1946 mengumumkan berdirinya Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada di gedung KNI Malioboro dan penobatan Ki Hajar Dewantoro sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Sejak berdirinya Universitas Gajah Mada di Yogyakarta disusul beberapa perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi kedinasan lain serta sekolah menengah, sekolah kejuruan dan sekolah dasar serta lembaga pendidikan non formal.

Yogyakarta sebagai kota pendidikan dipertegas para *stakeholder* dari berbagai institusi dan personal yang telah memberikan pernyataannya antara lain: 1). Sri Sultan HB X (2004:11) dalam Yogyakarta *in Corparated* menyatakan bahwa “Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota budaya dan kota pariwisata”; 2). Peraturaturan Pemerintah DIY Nomor 6 Tahun 2003 : Tentang Rencana Strategis Daerah DIY 2004-2008 dalam visi dan misi kota Yogyakarta tersirat “Terwujudnya pembangunan regional sebagai wahana menuju pada kondisi DIY pada tahun 2020 sebagai pusat pendidikan, pusat budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka; 3). Supardi (2003:15), Gerakan Yogyakarta kota

pendidikan dan taman pintar pendidikan; 4). Gunawan (2003:11), Yogyakarta sebagai kota pendidikan adalah komitmen *stakeholders* dan public, dalam hal ini Gunawan menegaskan komitmen adalah hak periogratis individu yang tidak dapat dikendalikan dengan cara apapun dari luar individu yang bersangkutan, dan komitmen dapat diharapkan tetapi tidak dapat direncanakan; 5). APTISI Wilayah V Yogyakarta, mempertahankan Yogyakarta sebagai kota pendidikan perlu investasi besar, kebijakan pemerintah bersama DPRD dengan melibatkan sekolah dan kampus; 6). Pernyataan Suyanto dalam pidato pengukuhan guru besar, pendidikan sebagai tolak ukur atau indikator segala aspek kehidupan, maka pendidikan sebagai panglima pembangunan dan investasi jangka panjang untuk menyiapkan sumberdaya pembangunan maka untuk mengatasi krisis diperlukan orang terdidik. Di Kopertis Wilayah V Yogyakarta terdapat 122 PTS dan 7 PTN termasuk kedinasan, dengan program studi lebih dari 300. Jumlah sekolah dasar sampai sekolah menengah sebanyak 379 institusi tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota; 7). Dalam kisah sukses para pejabat negara atau pelaku wirasusaha yang saat ini tidak tinggal di Yogyakarta dan masa mudanya mengenyam pendidikan di Yogyakarta, mereka masih memiliki rasa emosional dengan suasana Yogyakarta maka anak cucu mereka cenderung mereka kirim untuk belajar di Yogyakarta, menurut pendapat mereka Yogyakarta relative aman, murah dan budaya sopan santun dengan nuansa multicultural sangat me-

lekat dan mendukung studi anak cucunya. Tujuh alasan di atas menyakinkan publik sebagai identitas Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang penuh dengan berbagai fasilitas pendidikan dengan nuansa unik karena didukung oleh situasi kehidupan keraton yang memiliki kontribusi besar terhadap sejarah perjuangan kemerdekaan RI dan pendidikan secara nasional.

Disisi lain Yogyakarta memiliki beberapa pusat dan media pembelajaran yang berbeda dengan kota lain, antara lain media pembelajaran peninggalan sejarah mapun yang diciptakan baru oleh pemerintah bersama masyarakat, misalnya Candi Prambanan dan candi-candi lain, berbagai Musium, Taman Pintar, Malboro, Radio Anak, berbagai Pabrik, Rumah Pemulihan Gizi (RPG), Griya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Griya UMKM), Kebun Binatang, pasar tradisional yang unik (pasar sentir, pasar lowak, pasar barang bekas, pasar hewan), gunung merapi teraktif di dunia, pantai, dan lain sebagainya. Budi Santoso WS (2009:2) mempertegas bahwa tipikal pendidikan di Yogyakarta memiliki integritas dan intelektual, *Melting pot* suku bangsa di Indonesia, Sperit nasionalisme, wawasan kebangsaan (KH. Ahmad Dahlan, Ki Hajar Dewantoro, Sri Sultan HB IX, Prof. Sardjito, Prof Kusnadi Harjosumantri). Berpijak dari spirit pendidikan dan sejarah itulah makna pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 berbunyi:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara,”

dapat dengan mudah dapat diwujudkan sehingga fungsi pendidikan dalam membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat berbasis potensi Yogyakarta dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pendidikan di Yogyakarta menjadi salah satu unsur keistimewaan.

Unsur-unsur penguat keistimewaan Yogyakarta sebagai salah satu Daerah Istimewa telah memenuhi unsur-unsur pembentuk identitas menurut Sobirin (2010:12) ada tiga unsur pembentuk identitas yaitu kekhasan, kesamaan dan pembeda. Pertanyaan yang dapat diang-

kat di sini antara lain: apa yang menjadi kekhasan Yogyakarta? Apa kesamaan Yogyakarta dengan wilayah/propinsi lain? Dan apa yang menjadi pembeda Yogyakarta dengan kota/wilayah/propinsi lain? Jawaban atas pertanyaan di atas dapat dilihat pada Tabel 1.

Ketiga aktor pemerintah, masyarakat dan pemimpin telah terintegrasi untuk berkontribusi dalam memperkuat posisi Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Tabel 1 membuktikan bahwa Yogyakarta memiliki identitas keistimewaan, kekhasan dan keunikan serta memiliki kesamaan dengan propinsi lain dalam wadah NKRI. Pertama, *characteristic identify* (kekhasan) yang mengkristal menjadi *legal identity* (Maklumat 5 September 1945). Kedua, *causal identify*, kearifan local dari pemimpin (*niti projo* artinya Raja adalah wali dari rakyat, penetapan Gubernur dan wakil sebagai wakil Gubernur), dan masyarakatnya yang unik dan khas mengutamakan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya local dan kearifan seperti *mikul duwur mendem jero*), dalam memimpin peme-

Table 1. Unsur Pembentuk Identitas Yogyakarta

Indikator	Pemerintahan	Masyarakat	Pemimpin
Kekhasan	Berawal dari dua kerajaan dengan system monarki beradaptasi ke system presidential bergabung dengan RI, Gubernur adalah raja	Unik dan khas, menjunjung tinggi : Kenyakinan tentang kesadaran (<i>awareness</i>) Kebijakan (<i>wisdom</i>) Kesatuan seluruh umat (<i>unity of mankind</i>)	Selalu dari keluarga kerajaan/raja. Penetapan, prinsip Niti Projo. Sebagai wali (UU Keistimewaan DIY Nomor 13 Tahun 2012).
Pembeda	Menyatukan keragaman Kewenangan	Tidak memiliki hak untuk menjadi Gubernur dan wakil Gubernur <i>Selling point</i>	Tidak pemilihan Tidak mengisap rakyat Sering melakukan penyamaran dalam arti positif, ditetapkan melalui UU Keistimewaan DIY
Kesamaan	Kewenangan dan hak yang sama	Hak dipilih dan memilih, kecuali menjadi Gubernur dan wakil Gubernur	Jabatannya sama sebagai gubernur dan wakil gubernur lain

rintahan Sultan selalu berpihak kepada wong cilik/rakyat, salah satu kutipan Sri Sultan HB X pada 1 Mei 2000 : Saya harus membentuk jati diri untuk tumbuh dan mengembangkan wawasan untuk keberpihakan itu sendiri sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan. Keberpihakan kepada rakyat adalah panggilan nurani yang harus diwujudkan kedalam laku atau tindakan, sehingga masyarakat harus mengetahui setiap gerak langkah Sri Sultan HB X dalam membentuk jati diri dan rakyat diberi kesempatan untuk melihat apakah benar atau tidak, mampu atau tidak, sependapat atau tidak. Ketiga, bukti kuat *Legal identify* Sultan tidak saja diterima kalangan masyarakat Jawa tetapi diterima di tingkat nasional "Identitas sultan adalah raja orang Jawa, tetapi sultan milik nasional permata hati bangsa, muncul karena pribadi. Pluralisme budaya (kemajemukan adalah karunia). Sultan sebagai narasi besar Yogyakarta dan orang Jawa." Keempat, *identifying character* selalu melekat nama Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dengan nama pemimpin Raja sekaligus Gubernur, karena di Yogyakarta memiliki ke-aslian, ke-lokal-an, ke-unik-an yang tidak dimiliki daerah lain (Kraton-Malioboro-Tugu) memiliki makna sejarah, menjadi bergantungnya ratusan ribu mengais rejeki. Kelima, *multiple identify*, Yogyakarta menjadi *leading sector* apa mau-nya pejabat diubah apa maunya rakyat. Menurut Ali Imran, (3:1990-1991) Alquran berisi tanda-tanda-rambu-rambu, dalam terminology keislaman setiap makhluk hidup memiliki kekhasan sendiri-sendiri dalam memaknai atau menafsirkan

tanda-tanda ini menjadi hukum ketetapan (*sunnatullah*) perbedaan suku, agama, ras, warna kulit, bangsa, bahasa, dan lainnya menjadi roh bangunan keistimewaan Yogyakarta sebagai *identify*: a) Historisitas, peran sejarah yang dimainkan oleh Sultan Agung Haryokrokusumo dan Sri Sultan HB IX perjuangan yang menghantarkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan, Sri Sultan X dalam situasi Indonesia krisis kepemimpinan selalu menjadi poros untuk berunding seperti Habibi, Gusdur, Mega; b) Intelektualitas, Yogyakarta sebagai mata air pemikir tanah air, memiliki empat PT yang berwibawa UGM-UNY, UII, UIN keempat ini melahirkan tokoh pemimpin pejuang nasional; c) Pluralitas, sebagai kota pendidikan dan budaya di dalamnya kumpulan pemuda pelajar dari berbagai daerah yang memiliki perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan latar belakang keturunan, pendidikan, serta ekonominya, tetapi DIY mampu mengelola Pluralitas/miniaturnya Indonesia; d) Keberpihakan Gubernur kepada rakyat kecil merupakan bagian sikap yang menjadi panutan.

Selanjutnya para pemimpin Yogyakarta dalam melaksanakan pembangunan selalu berpijak pada filosofi pembangunan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah *Hamemayu Hayuning Bawana*, sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Dasar filosofi yang lain adalah *Hamangku-Hamengku-Hamengkoni*, Tahta Untuk Rakyat, dan

Tahta untuk Kesejahteraan Sosial-kultural. Konsep falsafah sebagai tonggak berdirinya Mataram Islam, sejak Demak – Jipang – Pajang hingga Panembahan Senopati – Prabu Hanyakrawati - Sultan Agung – Amangkurat - Paku Buwono – Hamengku Buwono – Paku Alam – Mangkunegara mengacu prinsip tauhid “wihdatil wujud – wushul wujud” yang dikemas dalam bahasa simbol: “*Sangkan Paraning Dumadi Manunggaling Kawula lan Gusti.*”

Sugiyanto (2004:31), sebagai kota pendidikan maka penduduk kota Yogyakarta didominasi oleh pelajar dan mahasiswa, jumlah pelajar dan mahasiswa di Yogyakarta menjadi faktor penarik bagi pelaku usaha baik pelaku usaha berskala besar dalam bentuk membuat kos-kosan sebagai rumah tinggal sementara, fasilitas publik seperti tempat-rekreasi dan olahraga seperti lapangan futsal, toko sepatu, pakian, tas, dan sebagainya maupun kelompok modal kecil seperti penjahit, sol sepatu, foto copy, warung makan, *laundry*, dan jasa-jasa lain. Kontribusi mahasiswa pada ekonomi daerah dalam laporan Bank Indonesia tahun 2004 menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa tahun 2004 di Yogyakarta ada 240.000 mahasiswa dengan rerata setiap mahasiswa membelanjakan Rp 1.000.000,- per bulan, maka peredaran uang di daerah mencapai 240 Milyar per bulan atau 2,8 trilyun pertahun dri jumlah tersebut hanya 4% masuk ke Perguruan Tinggi (untuk membayar SPP, praktikum, dan kebutuhan lain) selebihnya dibelanjakan untuk kebutuhan konsumtif.

Yogyakarta sebagai tempat belanja konsumtif mendorong meningkatnya jumlah café, rumah makan, pusat perbelanjaan, meningkatnya jumlah pendatang dari plosok Indonesia untuk berbisnis di Yogyakarta, meningkatnya jumlah sepeda motor, meningkatnya bisnis *entertainment*, *amusement* (seperti *music hall* dan *game center*), meningkatnya jumlah kunjungan keluarga mahasiswa.

Dampak sebagai kota pendidikan di Yogyakarta melahirkan peluang dan ancaman. Peluang bagi bisnis konsumsi dan ancaman bagi atmosfer pendidikan dan ancaman bagi ketertiban umum. Sebab tidak semua mahasiswa di Yogyakarta mampu menata dirinya menjadi orang sukses, banyak mahasiswa yang gagal dalam pergaulan, gagal studi serta terjerumus dalam dunia gelap lain. Bigron di atas mendorong munculnya empati masyarakat untuk peduli pendidikan, salah satunya Tim Pengerak PKK Kota Yogyakarta yang pada tahun 2002 memiliki program “Gerakan Sapa Anak Kos (GSAK)”, pada tahun 2004 program GSAK dikembangkan menjadi Kos Crisis Center (KCC). Proram GSAK dan KCC berupaya menjadi wadah dan media forum komunikasi anak kos agar mampu beradaptasi di Yogyakarta dengan baik dan sukses studi serta mewadahi forum pondokan/pemilik kos dan menjebatani antara anak kos dengan penduduk pribumi. Sebab anak kos sering menghadapi permasalahan adaptasi, pergaulan yang salah, kriminalitas, konflik antar suku, dll.

Kos Crisis Center (KCC)

Kos Crisis Center (KCC) adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang merupakan tindak lanjut dari program Gerakan Sapa Anak Kos (GSAK) Tim Pengerak PKK Kota Yogyakarta yang dimulai sejak tahun 2002 sampai saat ini. Amiroh (2004:4) KCC menjadi pusat pelayanan informasi, konsultasi dan pendampingan bagi anak kost. Unsur organisasi ini terdiri dari pelajar, mahasiswa Yogyakarta maupun luar daerah.

Visi KCC adalah berorientasi pada pendidikan, kebudayaan, sosial dan religius untuk mewujudkan masyarakat Yogyakarta yang beretika dan bermoral pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Misi KCC adalah: a) Mempertahankan citra Yogyakarta sebagai kota pendidikan, budaya, pariwisata dan miniature Indonesia dengan menjunjung norma-norma agama; b) Mewujudkan kota Yogyakarta sebagai kota yang berhati nyaman; c) Wadah untuk mengakomodir dan menyelesaikan permasalahan yang ada pada pondokan/kos. KCC memiliki beberapa tujuan yaitu: a) Mempertahankan reputasi kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota budaya; b) Memberikan informasi tentang pendidikan, sosial, budaya dan kos-kosan di Yogyakarta; c) Meningkatkan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, pelajar dan mahasiswa di Yogyakarta; d) Memberikan solusi konkrit dalam kehidupan masyarakat kota Yogyakarta khususnya kehidupan anak kost; e) Menemukan konsep yang strategis untuk kemajuan dan perkem-

bangsan Kota Yogyakarta. Bidang kerja KCC terdiri dari: a) Bidang informasi dan komunikasi; b) Bidang pendidikan dan pelatihan; c) Bidang konsultasi dan pendampingan; d) Bidang seni, budaya dan olahraga.

Visi, misi dan tujuan KCC merupakan salah satu upaya mendukung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta khususnya pasal 5 ayat (1) butir b yang berbunyi: "Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat." Dalam hal ini upaya-upaya yang dilakukan KCC menuju pada perwujudan ketentraman dan kesejahteraan anak kos yang tinggal di kota Yogyakarta. Jika anak kos merasa dirinya mendapat perlindungan dengan rasa aman dan tentram maka kesejahteraan anak kos dari aspek ketentraman dan keamanan berimbas pada masyarakat Yogyakarta khususnya para pemilik kos-kosan.

Dengan demikian KCC dapat dimanfaatkan oleh pelajar, mahasiswa yang berasal dari Yogyakarta maupun dari luar daerah Yogyakarta, induk semang/pemilik kos/pondokan/orang tua pemondok serta warga masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya KCC bermitra dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, Poltabes Yogyakarta, Napza *crisis center* dan forum komunikasi pemilik pondokan/kos disetiap kelurahan dan kecamatan. Atas itu KCC siap diajak berbagi rasa, tempat curhat untuk mencari solusi bersama bagi masyarakat umum yang berminat menyalurkan ide, pemikiran, kreasi ataupun

bantuan materi serta bersedia memediasi kepentingan positif dari masyarakat untuk masyarakat. Semua biaya operasional KCC dibebankan pada anggaran Pemerintah Kota melalui berbagai dinas terkait dalam naungan Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta.

Sejak berdiri sampai dengan tahun 2011 aktivitas yang sudah dilakukan oleh KCC adalah: 1) Deklarasi KCC dan Penerbitan Buku Harian Anak Kos; 2) *Roadshow* ke 14 Kecamatan dengan acara forum komunikasi antar anak kos dan pemilik pondokan; 3) Menyelenggarakan acara serimonial seperti buka puasa bersama anak kos se-Kota Yogyakarta; 4) Sidak Pondokan secara bertahap; 5) Menyelenggarakan lomba kebersihan dan ketertiban pondokan; 6) Bedah buku harian Anak Kos; 7) Penerbitan Buletin "SAPA;" 8) Menyelenggarakan sarasehan kesehatan reproduksi remaja dan kekerasan dalam pacaran; 9) Menyelenggarakan *focus group discussion* pemuda Kota Yogyakarta; 10) *Reshuffle* pengurus KCC; 11) Menyelenggarakan rembug budaya bekerja sama dengan Gayam; 12) Menyelenggarakan bakti pemuda Nusantara bekerjasama dengan Kesbangpor; 13) Menyelenggarakan *ngabuburit* Asyik Bareng KCC; 14) Pendaftaran Pondokan se-Kota Yogyakarta; 15) Pelatihan kewirausahaan bidang percetakan dan sablonase bekerjasama dengan asisten Deputi Kader Kewirausahaan Kemenegpora RI; 16) Kemah bakti pemuda Nusantara kerjasama dengan Kantor Kesbang POR Kota Yogyakarta; 17) Dialog interaktif remaja Yog-

yakarta; 18) Menyelenggarakan diskusi Remaja Cerdas: *No Free Sex, No Aids*; 19) Pelatihan jurnalistik Workshop ESQ; 20) Pelatihan Kader NAPZA dan anjangsana ke PSPP "Pamardi Putra" (Panti Rehabilitasi Narkoba); 21) Peninjauan dan pembinaan anjungan asrama Daerah; 22) Menyelenggarakan *Workshop* Pengembangan Potensi Diri dengan peserta pelajar/mahasiswa, anak kos dan karang taruna dan Seminar pembelajaran politik yang cerdas dan santun, serta Konsultasi dan pendampingan.

Walaupun kota Yogyakarta di gonggong gempa tahun 2006, pernah ditimpa isu-isu negatif dan erupsi Merapi 2010 hingga saat ini Yogyakarta tetap tegar sebagai kota pendidikan sebagai pilar utama identitas. Hal ini membuktikan bahwa Yogyakarta morfologi pendidikan sejak kelahirannya sampai saat ini dan sampai waktu yang tidak terbatas akan selalu memiliki manfaat. Emile Durkheim sejak tahun 1893 menegaskan bahwa pendidikan mempunyai tiga fungsi yaitu memperkuat solidaritas sosial dan peranan sosial serta mempertahankan pembagian kerja. Pendapat ini terbukti oleh masyarakat Yogyakarta, hal ini menjadi sumber melacak keberadaan Kota Yogyakarta dari waktu ke waktu berkaitan dengan proses terbentuknya Yogyakarta sebagai kota pendidikan.

Menurut Sugiyanto (2004:191) 90% pelaku usaha level mikro semua memberi pelayanan kepada mahasiswa dan pelajar, seperti transportasi, ojek, warung makan, foto copy, toko kelontong, *laundry*, *café*, warnet, bu-

tik, dan berbagai rental serta jasa-jasa layanan lain. Dalam proses pelayanan masyarakat (para pelaku usaha) kepada mahasiswa dan pelajar cenderung dengan sikap jujur, murah, penuh rasa ke-sungguhan, empati dan memiliki rasa bertanggungjawab serta bekerjasama dengan berbagai pihak yang terkait. Sikap masyarakat Yogyakarta yang diseliputi rasa budaya yang tinggi penuh dengan sopan santun dan egaliter membuat para pendatang baru menjadi krasan/betah dan menyebarluaskan bahwa hidup di kota Yogyakarta merasa aman, didukung oleh berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah setempat dan harga terjangkau. Sikap dan budaya ini yang mendorong tumbuh kembangnya pelaku *urban* ke Yogyakarta khususnya generasi muda dan pelaku usaha. Sikap dan budaya masyarakat yang mentradisi halus, *lembah manah*, jujur dan beretika karena pengaruh aura dua kerajaan, dan dua raja tersebut sampai hari ini ditetapkan menjadi pemimpin pemerintahan Yogyakarta.

Pengaruh Kepemimpinan

Identitas melintas waktu dan ruang, identitas diri dan pribadai adalah universal sebab dipengaruhi oleh ragam budaya yang unik dan variasi, hal ini menunjukkan bahwa manusia selalu tengggelam dalam sosial budaya akhirnya membentuk metafisik identitas. Keselarasan individu dan kolektif dalam budaya menjadikan identitas oleh filsafat yang bersumber pada kearifan lokal. Hal ini menun-

jukkan identitas sebagai puncak hubungan seseorang dengan orang lain dan mempromosikan cita-cita diri yang berakar pada tradisi. Konsep diri berbasis kebudayaan merupakan kombinasi dari semangat dan kecerdasan yang terkait erat dengan identitas yang bebas. Teori identitas sosial, Hogg, (1993), Hogg & Abrams, (1988), Tumer, (1991) kategori sosial seperti etnis, gender, afiliasi politik adalah bagian dari masyarakat terstruktur, identitas sosial pada gilirannya terhubung individu untuk masyarakat, berfikir keanggotaan kelompok mempengaruhi keyakinan individu, sikap dan perilaku dalam hubungan mereka dengan anggota kelompok lainnya, sehingga teori identitas sosial menekankan aspek sosial lebih dari aspek individu. Schlenkerker (1987) teori identitas sebagai produk intraksi simbolik menjelaskan hubungan antara masyarakat dan individu atas dasar peran, peran mengacu pada fungsi atau bagaimana seseorang melakukan perannya ketika menduduki posisi tertentu dalam kontek sosial tertentu. Peran seseorang adalah pola perilaku sosial yang muncul sesuai *expectations* orang lain dan tuntutan dari situasional. Agar lebih matang dan mapping yang tepat maka identitas dipelajari dalam arena psikologi, sosiologi dan antropologi, menurut Hecht (1993) identitas sebagai komulatif, identitas terbentuk, dipertahankan dan dimodifikasi dalam proses komunikatif sumber yang sama menjelaskan identitas pada gilirannya bertindak keluar dan dipertukarkan melalui komunikasi.

Komunikasi identitas Hecht (1993), Menempatkan dua cara dimana komunikasi diinternalisasikan sebagai identitas: 1) Makna simbolis dari fenomena sosial diciptakan dan dipertukarkan melalui interaksi sosial. Identitas terbentuk ketika makna simbolik relevan melekat dan terorganisir dalam individu dalam berbagai situasi melalui interaksi sosial; 2) Ketika individu menempatkan dirinya dalam kategori sosial dikenali, sebagaimana dinyantakan oleh teori identitas sosial mereka mengkonfirmasi atau memvalidasi melalui interaksi sosial apakah kategori ini relevan untuk mereka, dan diwujudkan melalui harapan dan motivasi.

Pemimpin Yogyakarta (Gubernur dan wakilnya) adalah seorang pemimpin kerajaan, artinya *double leadership*. Keduanya bukan makhluk sosial yang hidup dengan serba terbatas dan tertutup tetapi sebaliknya mereka terbuka dan memiliki jaringan yang luas. Sifat keterbukaan dan jaringan ini berkontribusi atas pembentukan identitas kolektif atau atribut kelompok. Jika saya boleh menggambarkan maka kepemimpinan para raja di Yogyakarta mengkonstruksi identitas diri dan masyarakat yang dipimpin juga mengkonstruksi pemimpinnya menjadi sebuah mata uang logam yang tidak akan memiliki arti jika uang logam tersebut dibelah. Artinya kehidupan di Yogyakarta antara pemimpin dan rakyat tidak bisa diberi makna jika harus dipisahkan. Kondisi ini sesuai pendapat (Liversey, 2004) struktur sosial beranggapan bahwa identitas seseorang adalah produk dari masyarakat, sebaliknya masyarakat juga membentuk

individu, sehingga identitas seseorang selalu mengalir dan tidak statis.

Kehidupan masyarakat Yogyakarta dengan pemimpin Raja sekaligus Gubernur dalam bentuk kehidupan kolektif yang masing-masing pihak telah memberikan kerelaan yang diperhitungkan sebagai sebuah pilihan. Hal ini senada dengan teori pertukaran, sebab teori ini menggambarkan bahwa pertukaran merupakan pilihan rasional yang dilandasi perilaku individu dan perilaku kolektif. Perilaku actor dan stakeholder dalam proses kehidupan membentuk lingkungan horizontal, vertical dan diagonal serta dipilih menjadi cermin bagi warganya. Dalam hal ini masing-masing pihak memperoleh *reward*, butuh pengorbanan sebagai *cost* dan mendapat profit non materi atau materi.

Kesejahteraan Sosial

KCC sebagai *community work* memandang anak kos sebagai aset pasar dalam pandangan liberal dan anak kos dituntut mampu beradaptasi dengan budaya lokal sebagai bentuk konservatif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Berangkat dari dua pandangan yang berlawanan KCC berupaya mengharmoniskan antara pandangan liberal dan konservatif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial anak kos dengan strategi manajemen.

Dalam diskursus kesejahteraan sosial ditunjukkan bahwa konsep kesejahteraan sosial dapat dilihat melalui empat aspek, yaitu aspek partisipasi dalam komunitas, aspek penerima layanan usa-

ha kesejahteraan sosial sebagai warga masyarakat, peran petugas komunitas untuk mempercepat perubahan dan aspek tanggung jawab terletak pada pengambil keputusan yang demokratis yang tercermin dalam pengambilan kebijakan yang meliputi desentralisasi, fasilitasi, bentuk struktur dan proses yang berbasis masyarakat. Charles Zastrow, (2004:12) usaha kesejahteraan sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan. Untuk mewujudkan kesejahteraan perlu nilai sebagai dasar pembatas antara yang belum dan sudah tercapai dengan batasan nilai, maka Saetarso (1994) nilai adalah kepercayaan, pilihan atau asumsi tentang baik buruk untuk manusia dan Sarah Bank, (2001:6) nilai adalah mengungkap dalam kehidupan sehari-hari manusia, nilai dapat berarti agama, politik, prinsip ideologi, keyakinan, atau sikap.

Community work adalah suatu proses dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan diri mereka sendiri melalui suatu aktivitas-aktivitas kolektif. KCC sebagai salah satu wujud community work yang berjuang untuk mempertahankan reputasi Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan. Dalam kerjanya KCC menerapkan berbagai pendekatan, diantaranya: 1) Pendekatan pelayanan (*self help strategy*), pendekatan yang digunakan *community worker* dalam upaya

memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah masyarakat dengan menggunakan sumber-sumber pelayanan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dalam hal ini KCC menerapkan prinsip bermitra dengan berbagai instansi terkait; 2) Pendekatan pemberian pengaruh (*influence strategy*), pendekatan yang digunakan *community worker* dalam upaya memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah anak kos dan masyarakat dengan memberikan pengaruh atau merubah kebijakan-kebijakan dari organisasi-organisasi pelayanan yang ada di luar masyarakat sendiri. Pengurus KCC sebagai Petugas Sukarela (*unpaid worker*) merupakan petugas yang bekerja dan aktif di masyarakat sebagai kader dan tokoh masyarakat serta bekerja tanpa bayaran. KCC dalam kerjanya memilih terpusat pada proses dengan tujuan intervensi yang lebih berorientasi pada proses, dimana intervensi lebih diarahkan pada upaya meningkatkan kepercayaan, pengetahuan, keterampilan maupun sikap anak kos, masyarakat dan pemerintah setempat. KCC sebagai *Specialist Community Worker* yang menangani permasalahan anak kos khusus/spesifik yang ada di masyarakat, pemilik pondokan dan masyarakat lain yang terlibat dalam kehidupan anak kos, pemilik pondokan dan lingkungan sekitar, kerja KCC terfokus untuk kepentingan bersama yang tidak lepas dengan visi, misi dan tujuan. Selanjutnya KCC juga menerapkan *generic community worker* untuk menangani berbagai permasalahan yang ada di masyarakat dan bebas untuk be-

kerja dalam membantu anak kos, pemilik pondokan dan masyarakat untuk mengartikulasikan serta mengupayakan pemenuhan kebutuhannya. Atas itu Ama (1993) mendefinisikan *community work* sebagai metode yang memungkinkan orang (anak kos dan pemilik pondokan) dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya.

Penutup

Sudut pandang sejarah menjadi bukti bahwa peran Kerajaan/kraton dengan model kepemimpinan monarki dan keduanya saling mengisi dan melengkapi dengan visi yang sama membela dan mencerdaskan rakyat. Pihak kerajaan telah memberikan sumbangan dan pemikiran berdirinya beberapa lembaga pendidikan dari yang berjenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Ini sebagai bukti bahwa pemimpin (raja) telah memfasilitasi pengembangan pendidikan, seni dan budaya bagi masyarakat, dengan demikian keraton menjadi pusat studi budaya, kearifan local dan ilmu pengetahuan lainnya, siapapun pemimpin kerajaan telah ditanamkan visi dan misi yang menjadi *value* dan harus ditaati sehingga sampai saat ini Yogyakarta dapat mempertahankan status sebagai kota pendidikan.

Upaya mempertahankan Yogyakarta sebagai kota pendidikan mendapat dukungan dari berbagai organisasi sosial, politik, ekonomi dll. KCC sebagai salah satu organisasi sosial yang telah beru-

paya membantu mewujudkan kesejahteraan para pelajar dan mahasiswa yang berorientasi pada harmonisasi nasionalisme. KCC sebagai *organization cultures* atau jamak, dalam hal ini ada tiga unsur yang menunjukkan jamak tersebut yaitu : 1) Integrasi, pendekatan Homogen; 2) Deferensiasi, tiap group punya budaya berbeda dan; 3) Fragmentasi, budaya tidak bisa dikotak-kotak bukan perspektif tunggal.

Organisasi sebagai *Culture*: organisasi memiliki budaya, sebagai *variable* yang dapat dimanage, dalam kajian tentang budaya yang melembaga pada umumnya organisasi memiliki budaya/variabel-variabel yang lain. Budaya berfungsi sebagai variabel yang dapat diubah dan diatur untuk meningkatkan performance organisasi, sehingga budaya menjadi *over* atau tidak menarik. Oleh pimpinan organisasi budaya diciptakan dan dibuat slogan dengan harapan budaya menjadi harapan yang *strong culture*. Ketika terjadi *strong culture* maka implikasi satu keseluruhan organisasi memiliki budaya tunggal yang sangat kuat/*strong*. Jika budaya tidak kuat maka pengaruhnya terhadap kinerja menjadi buruk (inilah pandangan yang sangat umum dari perspektif manajemen). Budaya harus dilihat dari historis, kalau visi misi organisasi ini menjadi lipstick yang salah maka budaya dapat dikuantitatifkan melalui survey atas itu peran pendiri organisasi menjadi satu-satunya *Father* yang harus dikuantitatifkan, melalui analisis kuantitatif dengan survey maka budaya menjadi *variable* yang *termange*.

Domain kesejahteraan sosial menunjukkan konsep “Sosial” dalam makna hubungan antar manusia, dalam hubungan antar manusia akan tercipta “Sistem” dan sistem akan membentuk fungsionalitas sosial. KCC berupaya mencegah terjadinya disfungsi sosial anak kos dalam kehidupan sehari-hari yang disebabkan banyak hal, ketidakberfungsian sosial menunjukkan ketidakmampuannya melaksanakan peran sosial yang diamanahkan oleh nilai-nilai masyarakat atas itu KCC siap menjadi jembatan antara anak kos dengan masyarakat setempat, lingkungan dan pemilik pondokan dalam proses harmonisasi. Sebab status anak kos merupakan status yang banyak diperhitungkan dan dipermasalahkan dalam tantangan positif dan negatif, sebab setiap status akan menimbulkan hak dan kewajiban atau tanggungjawab yang disebut sebagai *role* dan menyangkut perilaku orang.

Fenomena anak kos yang kurang mampu dalam melakukan proses adaptasi sehingga fungsi sosialnya/kapasitas individu kurang terakomodir dan kurang maksimal dalam menyatu dengan masyarakat lokal Yogyakarta maupun sesama anak kos, atas itu perlu KCC memaksimalkan anak kos dalam memainkan peran fungsi sosial/kapasitas anak kos dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya. Atas itu KCC menyakini bahwa kesejahteraan sosial sebagai kegiatan dengan mengembangkan berbagai usaha kesejahteraan sosial yang dikembangkan untuk membantu, mengembangkan dan

mendukung terciptanya peningkatan taraf hidup anak kos, keluarga anak kos maupun masyarakat umum, merupakan inti perwujudan manajemen kesejahteraan sosial anak kos di Yogyakarta dalam rangka berkontribusi mempertahankan predikat Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berhati Nyaman.

Daftar Pustaka

- Achmad Sobirin. 2010. *Hakekat Identitas Diri: Sebuah Kajian Filosofi dan Psikologis*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.
- Amiroh. 2004. *Buku Harian Anak Kos*. Yogyakarta: PKK Kota Yogyakarta.
- Bambang Soewondo. 1977. *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan kebudayaan.
- Charles Zastrow, 2004, *Introduction to Sosial Work and Sosial Welfare*, Thomson Higher Education.
- Edward A. 1978. “Emile Durkheim” dalam Tom Bottomore & Robert Nisbet. *A History of Sociological Analysis*, New York: Basic Books, Inc.
- Gran, G. 1983. *Development by People*. New York: Praeger.
- Liversey, C. 2004, Culture and Identity, Sociological Pathway, available at. <http://www.sociology.org.uk/Pathway2.htm> diakses 30 Oktober 2010.

- Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho D. 2007, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Gramedia.
- Saetarso. 1994. *Praktek Pekerjaan Sosial Dalam Pembangunan Masyarakat*. Bandung: Koperasi Mahasiswa STKS Bandung.
- Santoso, Budi W. 2009. *Pendidikan Yogyakarta Pembentuk Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Kopertis Wilayah V.
- Sapto. 2004. Nyi Roro Kidul dan Resiko Bencana Tsunami. Antara News. Jakarta. <http://webforum.plasa.com/showthread.php>
- Schlenkerker.1987. *The People Make The Place*. Personnel Psychology.
- Sugiyanto. 2004. Yogyakarta Kota Pendidikan dan Ekonomi Alternatif. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, Edisi XXII. No. 3. Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta.

Sumber Lain

- Gunawan. 2003. Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan “*Kedaulatan Rakyat*”, Edisi 27 Desember 2003, Halaman 11.
- HM. Nasrudinn Anshoriy CH & Zainal Arifin Thoha. 2005. *Berguru Pada Jogja Demokrasi dan Kearifan Lokal*, “Kutub” Yogyakarta bekerjasama dengan SKH. Kedaulatan Rakyat Yogyakarta.
- Supardi. 2003. Gerakan Yogyakarta Kota Pendidikan Terkemuka. *Kedaulatan Rakyat*, Edisi Desember 2003, Halaman 15.
- Sri Sultan HB X. 2004. “Yogyakarta 2020 Kota Pendidikan atau Kota Teknologi, *Kedaulatan Rakyat*”, Edisi 8 Januari Halaman 11.
- Peraturan Pemerintah DIY Nomor 6 Tahun 2003: Tentang Rencana Strategis Daerah DIY 2004-2008.
- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.